

MUSLIM PERKOTAAN DI TENGAH PUSARAN PILKADA 2017 DI KOTA YOGYAKARTA

Muh. Isnanto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mas_nanto@yahoo.com

Abstract

In the 2017 elections in the city of Yogyakarta, which used to be the basis for the number 1 candidate's voice bag carrying Imam Priyono-Ahmad Fadli suffered defeat, this event if connected with the product 3 times the election in the reform era, this may not have much benefit to the lives of the people, the leaders or respected members of the council are still busy thinking about the bearer party rather than thinking about the interests and or needs of the real people, especially the welfare of the people in general. The problem is how high is the level of concern of urban Muslims in the city of Yogyakarta towards the candidate pair (Paslon) in the 2017 elections and why are urban Muslim communities like that, what are the factors?

Research results show that, *firstly*, the level of concern of the urban Muslim community towards the Regional Head candidates in the 2017 elections. The community has started to use the basis of their rationality and religious awareness by always checking/recognizing their candidate pairs (47%), considering quality by never considering religious attributes 47%, always considering intelligence 53%, not considering gender 70% and ethnicity 69%, always considering 61% personality, 41% expertise, 45% participation. More than half (54%) warned that they knew that a candidate pair was using improper means and refused when a candidate in the election tripped over a case. More than half (52%) did not choose a candidate pair who tripped over the case. Report potential regional head pairs if someone cheats or violates the law. more than half (64%) report to the authorities. *Secondly*, factors that cause high concern because of the institutionalization of democracy, the election as a shortcut; and religious awareness

Keywords: Muslim Concern for Paslon

I. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi di Indonesia secara serentak telah dilakukan di 7 Propinsi di 76 Kabupaten dan 18 Kota pada tanggal 15 Februari 2017. Salah satu diantaranya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan di Kabupaten Kulonprogo dan di Kota Yogyakarta. Peneliti memfokuskan penelitian kali ini pada pilkada yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Pilkada di Kota Yogyakarta diikuti 2 (dua) pasangan calon (paslon), yaitu paslon nomor urut 1 Imam Priyono Putranto dan Achmad Fadli dan paslon nomor urut 2 Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Haryadi merupakan walikota Yogyakarta sementara Imam Priyono saat ini merupakan wakil Haryadi. Haryadi-Heroe diusung oleh Partai Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP. Sementara Iman-Achmad diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, dan PKB.

Berdasarkan data yang diunggah di laman KPU RI, jumlah pemilih di Kota Yogyakarta mencapai 301.367 sementara yang menggunakan hak pilih mencapai 214.262. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,1 persen. Data yang masuk ke KPU sebanyak 100 persen, diambil dari seluruh 794 TPS di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan KPU menunjukkan persaingan ketat di antara Paslon yaitu Haryadi-Heroe unggul 100.333 (50,30%) sementara Imam-Achmad berada di peringkat kedua dengan 99.146 suara (49,70%). Selisih suara kedua pasang calon itu 1.187 suara. Sedangkan, surat suara sah sebanyak 199.479 dan tidak sah 14.355 suara. Dalam daftar pemilih tetap terdapat 298.989 pemilih. Imam kalah di Kecamatan Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Umbulharjo, dan Wirobrajan. Sedangkan di Yogyakarta terdapat 14 kecamatan. Di Kecamatan Kraton misalnya calon nomor urut dua meraih 5.850 suara atau 53,3 persen. Sedangkan, calon nomor urut satu mendapatkan 5.123 suara atau 46,7 persen. Kecamatan-kecamatan itu menjadi basis Haryadi-Heroe. (*Tempo.Co.Pilkada 2107, jum'at 22 Februari 2017/22.20*).

Hasil pilkada di atas menunjukkan bahwa wilayah-wilayah seperti kecamatan Kraton, Ngampilan, Wirobrajan dan juga Umbulharjo, dalam pilkada 2017 yang selama ini menjadi basis kantong suara paslon nomor 1 mengalami kekalahan, Kekalahan ini jika dihubungkan dengan produk 3 kali pemilu di era reformasi menurut responden belum banyak memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat. Disamping itu pemikiran dan partisipasi masyarakat juga mengalami proses transformasi nilai agama terhadap kehidupan sosial politik. Nampaknya peran masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan memberikan jawaban atas realitas terjadinya kondisi yang seperti itu.

Menurut Mas'ud dkk, di Yogyakarta terdapat empat lingkup wacana dan praktek pluralisme, yaitu bidang keagamaan, menciptakan sebuah "platform bersama"

bagi ragam umat beragama, bidang civic berorganisasi bagi kaum perempuan, bidang politik: mengatasi politik konvensional dan bidang ekonomi: menjembatani jurang etnis. (Hefner, 2007: hal. 213-225) Di era serba modern ini pedoman hidup sangat dibutuhkan, agama dengan gerakan keagamaannya semakin dituntut untuk dapat merespons setiap perkembangan yang ada di masyarakat.

Pedoman hidup bangsa ini sudah terkandung dalam isi 5 sila pada Pancasila. J. Kristiadi dalam sebuah presentasi mengakui bahwa telah terjadi kemiskinan ideologi Pancasila. Membangun demokrasi di Indonesia tidak mudah, sistemnya ruwet dan sejak awal bangunan demokrasi cacat, karena adanya petualangan politik sehingga harus mampu membebaskan kemiskinan ideologi. Politik bukan tempat menjadikan orang baik, tetapi tempat untuk orang-orang memperoleh kekuasaan. Karena itu unsur kekuasaan harus ada kontrol dari kekuasaan lain, sehingga kekuasaan itu benar-benar untuk kemaslahatan. (J Kristiadi, 2013: 2)

Berangkat dari latar masalah di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah seberapa tinggi tingkat kepedulian masyarakat muslim di Kota Yogyakarta terhadap pasangan calon (Paslon) pada pilkada 2017?, mengapa kepedulian masyarakat Muslim di Kota Yogyakarta terhadap pasangan calon (Paslon) seperti itu, apa faktor-faktornya?

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk melihat seberapa tinggi tingkat kepedulian masyarakat Muslim di Kota Yogyakarta terhadap pasangan calon (Paslon) pada pilkada 2017. *Kedua*, mengetahui kepedulian masyarakat Muslim di Kota Yogyakarta terhadap pasangan calon (Paslon) dan apa faktor-faktornya. Sedangkan manfaat yang diharapkan bentuk kepedulian ini nantinya dapat digunakan sebagai pembelajaran politik kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan dari manapun.

Studi tentang perilaku politik dan kerukunan hidup antar umat beragama belakangan banyak dilakukan. Hal ini sejalan dengan munculnya agenda bersama untuk melihat agama sebagai suatu kekuatan moral dalam memecahkan berbagai problem kemanusiaan universal. Di antara sejumlah hasil studi dalam bingkai pemecahan problem kemanusiaan universal ini adalah karya Muhamad AS Hikam, *Islam and the Empowerment of Civil society in Indonesia* (1996), *Demokrasi dan Civil society* (1996) Mansour Faqih, *Paradigma Teologi Pembebasan* (2001), dan Sindunata, *Teologi Pembebasan* (2002). Demikian halnya di Indonesia, kajian dengan perspektif serupa juga dikembangkan oleh A. Mukti Ali, mantan menteri agama RI, dalam bukunya *Ilmu Perbandingan Agama, Sebuah Pembahasan tentang Metodos dan Sistema* (1965). Melalui karyanya ini, Mukti Ali memperkenalkan sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami agama orang lain dalam kerangka membangun

dialog antar umat beragama secara sehat dan damai. Atas dasar pengenalan terhadap pendekatan itu, lanjut Mukti Ali, kesadaran terhadap prinsip *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan) dapat ditumbuhkan di antara kalangan pemeluk agama. Keseluruhan hasil studi ini secara umum memberikan gambaran tentang kebutuhan terhadap pentingnya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap agama dalam kerangka kerukunan hidup antar pemeluk agama

Selanjutnya *Konsep Kepedulian dalam KBBI on line* memberi makna “peduli” berarti mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan. “Kepedulian” dimaknai sebagai perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memprihatinkan). Dalam konteks sosial, kepedulian dimaknai sebagai sikap mengindahkan (memprihatinkan) sesuatu yang terjadi dalam masyarakat (<http://kbbi.web.id/>, diakses 30 Agustus 2016). Poerwadarminta (2007) memberi makna ‘peduli’ ketika digandeng kata sambung ‘akan’ atau ‘dengan’ berarti ‘memperhatikan’ atau ‘menghiraukan’. Jika diawali dengan kata ‘tidak’ (tidak peduli) berarti ‘bagaimana pun biarlah’ atau ‘tidak mengindahkan apa pun jua’. Heidegger (dalam Leininger 1981) menyebutkan bahwa peduli merupakan fenomena dasar dari eksistensi manusia termasuk dirinya sendiri, dengan kata lain jika kita tidak peduli, maka kita akan kehilangan kepribadian kita, kemauan kita dan diri kita.

Kepedulian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan Paslon yang akan dipilih oleh umat Islam. Tindakan individu dengan memperhatikan pasangan calon (paslon) dan menghiraukan norma-norma agama. Tindakan di sini dalam arti perilaku, sesuatu yang tereksternalisasi dalam dunia objektif.

Teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action-TRA) dan teori rencana perilaku (Theory of Planned Behavior-TPB) dari Ajzen dan koleganya (dalam Glanz, dkk. (ed.), 2008: 70) menyebutkan bahwa sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol yang dirasakan (*perceived control*) mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan (*intention to perform the behavior*). *Intention* (niat) merupakan konklusi atas berbagai pertimbangan yang ada dalam pikiran individu, atau kondisi mental yang mewakili komitmen untuk melaksanakan suatu tindakan atau tindakan di masa depan. Niat melibatkan aktivitas mental seperti perencanaan dan pemikiran. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku atau corak dari tindakan merupakan ekspresi dari *intention*. (Glanz, dkk. (ed.) 2008: 70)

Penelitian ini mendasarkan studinya atas kerangka kerja yang bertumpu pada pendekatan kearifan agama. Pilihan terhadap perspektif ini didasarkan pada kendala penelitian mengenai pengembangan atau pemberdayaan masyarakat yang selama ini

diterapkan, pada umumnya cenderung lebih dilihat dari perspektif peneliti, yakni bersifat *etik*; sementara -tidak menutup kemungkinan- kendala itu justru muncul dari kondisi obyektif yang terdapat dalam internal masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk dilihat dari perspektif masyarakat yang diteliti, yakni bersifat *emik* (Ahimsa, 1986: Th). Pilihan terhadap perspektif ini juga dilandasi oleh cakupan analisisnya yang bersifat komprehensif, sehingga memungkinkan permasalahan yang diamati melibatkan berbagai perspektif ilmu (Soemarwoto, 1994: 56). Dan dilihat dari cara kerja dan cakupan analisisnya, perspektif kearifan agama ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari arus pendekatan etnosains yang mengkaji kebudayaan suatu masyarakat menurut pemahaman masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri (Putra, 1986: 105).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan *pertama*, daerah ini dikenal dengan gerakan keagamaan yang tumbuh di tengah masyarakat, tidak menimbulkan gejala. *Kedua*, masyarakat wilayah ini militan dengan pilihan politiknya, namun tetap dinamis, tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dan *ketiga*, wilayahnya mudah dijangkau, karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan DIY.

Sifat penelitian ini adalah eksploratif menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mix-methode*). Penggunaan metode ini berdasar pada pendapat Tashakori & Teddlie (2010: 13) diperlukan jika peneliti mengavaluasi ketepatan jawaban-jawaban responden daripada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Pendekatan yang digunakan adalah interpretatif, yakni konsep-konsep yang dikembangkan berlandaskan pada pengetahuan pelaku. Pengumpulan data serta pemahaman mengenai pola-pola perilaku keagamaan dan mobilitas-interaksi, dipergunakan pendekatan *struktural fungsional*, yaitu gejala-gejala yang ada dalam sasaran penelitian dilihat sebagai satu-satunya yang berdiri sendiri, tetapi satu sama lain saling berkaitan.

Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dengan menyebarkan questioner, wawancara, dan studi dokumentasi baik tertulis, monografi atau dokumen-dokumen terkait. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan pencarian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan (*field notes*) dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan, agar peneliti dapat memperoleh pemahamannya sendiri mengenai fokus penelitian

III. Hasil dan Pembahasan

A. Profil Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta (Jawa: Kutha Ngayogyakarta) adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575–1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Secara etimologi nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu *Ayogya* atau *Ayodhya* yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, *yogya* merujuk pada *yodya* atau *yudha*, yang berarti “perang”), dan *Karta* yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India di mana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan *leluri* (riwayat oral) telah berupa sebuah *dalem* yang bernama Dalem Gerjiwati; lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. (Surjomihardjo: 2008.)

Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl. Dengan luas 32.50 km². Kecamatan Mantrijeron 2,61 km², Kraton 1,40 km², Mergangsan 2.31 km², Umbulharjo 8.12 km², Kotagede 3.07 km², Gondokusuman 3.97 km², Danurejan 1.10 km², Pakualaman 0.63 km², Gondomanan 1.12 km², Ngampilan 0.82 km², Wirobrajan 1.76 km², Gedongtengen 0.96 km², Jetis 1.72 km², dan Tegalrejo 2.91 km². (Data BPS 2013)

Secara administratif kota Yogyakarta tampak terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya. Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2012, berjumlah 402.679 jiwa, dengan proporsi laki-laki sebanyak 195.712 jiwa dan perempuan sebanyak 206.967 jiwa.

B. Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Pasangan Calon pada Pilkada di Kota Yogyakarta

1. Potret Data Responden

Kepedulian Muslim dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yaitu dengan merujuk sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol yang dirasakan (*preceived control*) mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan (*intention to perform the behavior*). *Intention* (niat) merupakan konklusi atas berbagai pertimbangan yang ada dalam pikiran individu, atau kondisi mental yang mewakili komitmen untuk melaksanakan suatu tindakan atau tindakan di masa depan.

Responden pada penelitian ini adalah masyarakat Muslim kota, yang ditentukan secara acak dengan jumlah responden sebanyak 153 orang. Data responden disajikan terkait 3 (tiga) hal yaitu berhubungan dengan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Berikut secara berurutan disampaikan perbandingan responden berdasar jenis kelamin di kota Yogyakarta bahwa responden laki-laki sebanyak 102 orang (67 %) dan responden perempuan sebesar 51 orang (33 %.)

Data responden berdasar tingkat pendidikan di kota Yogyakarta DIY menunjukkan bahwa masyarakat muslim kota Yogyakarta telah mengenyam pendidikan meski sampai pada pendidikan dasar (SD/Sederajat), ini pun jumlahnya sangat kecil (2%). Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta lebih setengahnya (59%) berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan bahkan meski hanya sebagian kecil (3%) ada yang tingkat pendidikannya sampai pasca sarjana.

Data responden berdasar jenis pekerjaan di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat Muslim di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta kurang dari setengahnya (31%) bekerja di sektor lain diluar PNS, swasta, pegawai swasta sebagai wiraswasta dan sebagian kecil (6%) yang bekerja sebagai PNS/POLRI/TNI.

2. Kepedulian Masyarakat Muslim Perkotaan pada Pilkada 2017

Sebelum masuk substansi pembahasan, peneliti mencoba membuat pemetaan kecil tentang perilaku pemilih dalam menentukan pilihan atas Pasangan Calon (Paslon) pada pilkada. Secara garis besar perilaku pemilih dalam konteks Pilkada di kota Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi kategori; *Pertama*, penentuan pilihan karena kasamaan ideologi dengan Paslon. Saat ini kehidupan masyarakat dengan politik aliran terlihat semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor determinan. *Kedua*, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. *Ketiga*, pilihan karena kesamaan etnisitas. Banyak yang mengasumsikan, etnisitas turut menentukan pilihan politik seseorang, sehingga salah satu kandidat Pilkada menjadikan isu etnisitas sebagai penarik suara, meski tidak terlalu signifikan. *Keempat*, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini dapat muncul karena banyak hal, seperti politik uang, kedekatan dengan kandidat, dan sebagainya. Dan *kelima*, pilihan karena program dan integritas kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini. Tapi tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan.

Menurut Ramlan Surbakti dan Dennis Kavanaugh (1992: hal 146) terdapat pilihan rasional yang melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi

antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dan Nimmo (tt: hal 148) dalam bukunya Komunikasi Politik: *Khalayak dan Efek* yang mengatakan bahwa: Pemberi suara yang rasional pada hakikatnya aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warganegara

Penerapan *pilihan rasioanal (rational choice)* menyebabkan terjadinya pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis maupun psikologis. Dua pendekatan terakhir tersebut menempatkan pemilih pada situasi dimana mereka tidak mempunyai kehendak bebas karena ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya. Sedangkan dalam pendekatan rasional yang menghasilkan pilihan rasional pula terdapat faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang, misalnya faktor isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan.

Buchanan dan Tullock mengajarkan bahwa dalam menentukan suatu *public choice*, terdapat aspek-aspek yang lebih daripada sekedar memenuhi peraturan politik pemerintah dalam pemilu. Aspek-aspek tersebut meliputi pilihan-pilihan untuk membuat suatu keputusan sosial dengan mempertimbangkan lembaga-lembaga perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah, disamping mekanisme pemerintahan lain yang terpusat dalam suatu negara dan lembaga-lembaga yang menggabungkan antara sektor publik dan sektor privat. Lebih lanjut Buchanan dan Tullock menyatakan bahwa untuk menghasilkan keputusan sosial tersebut dibutuhkan adanya integrasi antara politik dan ekonomi. (Anggoro, 20016: 14).

Ditambahkan **Mujani**, seorang pemilih akan cenderung memilih parpol atau kandidat yang berkuasa di pemerintahan apabila merasa keadaan ekonomi rumah tangga pemilih tersebut atau ekonomi nasional pada saat itu lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya, sebaliknya pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih jika keadaan ekonomi rumah tangga dan nasional tidak lebih baik atau menjadi lebih buruk. (<http://islamlib.com?page.php?page=article&id=703>)

Jika dihubungkan dengan uraian di atas, partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kota Yogyakarta mengalami pergeseran pilihan. Pergeseran pilihan terjadi di beberapa kecamatan dimana kecamatan yang tadi merupakan basis militan dari partai yang seharusnya bisa menyumbang suara ke Paslon nomor 1 ternyata kalah, seperti misal dikecamatan Ngampilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang selama ini dibilang kuat dalam basis ideologi kepartaiannya berubah menjadi basis realitas pilihannya.

Disamping itu tingkat kepedulian masyarakat Muslim juga relatif tinggi, masyarakat kota Yogyakarta sudah mulai menggunakan basik kesadarannya dengan menggunakan rasionalitas dan keagamaannya. Kepedulianya ditunjukkan dengan melakukan langkah-langkah dengan cara memeriksa/mengenali calon pasangan kepala daerah (kenali calonnya), menanyakan/mempertimbangkan kualitas, memperingatkan, menolak, dan melaporkan calon pasangan kepala daerah jika ada yang berbuat curang dan melanggar hukum. Hasil yang didapat di lapangan menunjukkan sebagai berikut:

- a. Memeriksa/mengenali calon pasangan kepala daerah (Kenali calonnya), yang **selalu** memeriksa/mengenali paslonnya (47%) bahwa mengenali lebih jauh Paslon merupakan hal yang paling penting. Kemudian yang **kadang-kadang** (29%), alasannya adalah sebagian para pemilih sudah meyakini bahwa Paslon sudah kapabel. Sedangkan yang **tidak Pernah** (24%) dengan alasan tidak mau repot bahwa siapapun Paslonnya tidak masalah, Masyarakat pemilih hanya menggugurkan kewajiban sebagai pemilih.
- b. Menanyakan/mempertimbangkan kualitas. Kualitas seorang calon menjadi pertimbangan masyarakat pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Kualitas tersebut dilihat dari bagaimana pemilih ketika menentukan pilihannya apakah mempertimbangkan atribut keagamaan, intelegensia, gender, perbedaan etnis, kepribadian, keahlian, partisipasi.
 - Terkait dengan atribut keagamaan menunjukkan kurang dari setengahnya 47% atribut keagamaan tidak pernah menjadi pertimbangan.
 - Terkait dengan intelegensia, menunjukkan lebih dari setengahnya 53% ketika memutuskan memilih paslon kepala daerah masyarakat Muslim selalu mempertimbangkan intelegensia, dan tidak mempertimbangkan sebesar 16%.
 - Terkait dengan gender, menunjukkan lebih dari setengahnya 70% ketika memutuskan memilih Paslon kepala daerah masyarakat Muslim tidak mempertimbangkan gender (laki atau perempuan).
 - Terkait dengan etnis, menunjukkan lebih dari setengahnya 69% ketika memutuskan memilih Paslon kepala daerah masyarakat Muslim tidak pernah

mempertimbangkan etnis. Yang kadang mempertimbangkan sebesar 19%. Dan yang selalu mempertimbangkan sebesar 12%.

- Terkait dengan kepribadian, menunjukkan lebih dari setengahnya 61% ketika memutuskan memilih Paslon kepala daerah masyarakat Muslim selalu mempertimbangkan kepribadian. Yang kadang mempertimbangkan sebesar 29%. Dan yang tidak pernah mempertimbangkan sebesar 10%.
 - Terkait dengan keahlian, hampir setengahnya 41% ketika memutuskan memilih Paslon kepala daerah masyarakat Muslim selalu mempertimbangkan keahlian/kepakaran Paslon. Yang kadang mempertimbangkan sebesar 41%. Dan yang tidak pernah mempertimbangkan sebesar 20%.
 - Terkait dengan partisipasi, hampir setengahnya 45% ketika memutuskan memilih Paslon kepala daerah masyarakat Muslim selalu mempertimbangkan partisipasi calon dalam kehidupan sosial. Yang kadang mempertimbangkan sebesar 31%. Dan yang tidak pernah mempertimbangkan sebesar 24%.
- c. Memperingatkan, lebih dari setengahnya (54%) masyarakat Muslim jika mengetahui ada Paslon menggunakan cara-cara yang tidak benar, akan memperingatkan secara baik-baik. Sedangkan kurang dari setengahnya 46% tidak perlu memperingatkan. Pemilih muslim beranggapan bahwa kalau memang ada yang demikian pasti akan menuai hasilnya, cara kotor akan berakhir dengan kesengsaraan.
- d. Menolak, tindakan pemilih ketika Paslon pilkada tersandung kasus. Lebih dari setengah (52%) masyarakat Muslim tidak jadi memilih Paslon yang tersandung kasus. Kemudian sebanyak 40% pemilih tetap memilih dengan mengalihkan pilihan kepada Paslon lain. Sedangkan sebanyak 8% lainnya tetap memilih Paslon tersebut.
- Kemudian tindakan pemilih menentukan pilihannya ketika Paslon berbeda ideologi. Lebih dari setengahnya (55%) masyarakat Muslim tidak jadi memilih paslon pilihan tersebut. Kemudian sebagian yang lain (31%) tetap memilih dengan mengalihkan pilihan pada paslon lain, dan sebesar 14% tetap memilih paslon tersebut.
- e. Dan melaporkan calon pasangan kepala daerah jika ada yang berbuat curang dan melanggar hukum. lebih dari setengahnya (64%) masyarakat Muslim akan melaporkan kepada pihak berwenang. Tindakan ini diambiloleh masyarakat karena segala sesuatu yang berawal dari tindak kecurangan hasilnya tidak akan berokah. Kecurangan yang demikian itu tidak adil terhadap Paslon yang dicurangi dan perbuatan yang demikian jelas-jelas melanggar hukum.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

a. Institusionalisasi Demokrasi

Sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya sebagai pengalaman jalan pintas untuk melakukan institusionalisasi demokrasi. Kehadiran rakyat di TPS, pilkada seolah menemukan keabsahan legitimasi. Sementara pendidikan politik sama sekali diabaikan, apalagi pemberian pemahaman kepada publik untuk menuntut hak-hak kewarganegaraannya. Dengan banyaknya suara yang tercecer, kita melihat proses pengabaian atas hak-hak warga negara, terutama hak untuk memilih.

Idealnya, pilkada menjadi jalan pintas untuk menanggulangi aneka persoalan publik, seperti busung lapar, polio, pengangguran, sampai "tsunami" pendidikan. Kenyataannya Pilkada masih menjadi pesta kalangan terbatas, sementara rakyat masih bersabung nyawa, bersimbah kemiskinan. Bahkan, hak untuk berpartisipasi pun disunat akibat arogansi penyelenggara pilkada. Apakah warga masyarakat akan terus mengatakan, Indonesia dalam rel yang tepat menuju kemakmuran hakiki dan kebebasan manusiawi?

b. Kesadaran Keagamaan

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota kreatif, kota agama dan kota multikultur merupakan modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Masyarakatnya yang heterogen dan terdidik menjadikan kota ini dikenal dengan kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Kondisi sosialnya terjaga dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran pendidikan agama dan atau penyuluhan agama yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Masjid-masjid dan Mushala secara intens, menjadikan masyarakat menjadi melek agama. Kegiatan dimaksud seperti, pengajian-pengajian Ibu / Bapak yang banyak diselenggarakan di Masjid/ mushala/ dan atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana disampaikan salah satu sumber:

"Masyarakat dan pemuda di kampung saya, Pakuncen, sudah tidak seperti dahulu, dalam beberapa tahun terakhir ini tingkat keagamaan masyarakatnya dapat dibilang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah dan mengikuti pengajian-pengajian. (wawancara, November 2017)

Kegiatan seperti yang disampaikan itu juga marak dilakukan di beberapa tempat di wilayah Kota Yogyakarta. Aktivitas warga dalam bidang keagamaan tersebut sedikit banyak sangat mempengaruhi pola pikir dalam berdemokrasi, yaitu dalam pilkada

kota Yogyakarta Tahun 2017 lalu. Disamping hal tersebut sentiment keagamaan yang muncul di dalam pelaksanaan pilkada tidak bisa dipungkiri. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP dalam Peristiwa pilkada DKI menjadi pemantik pemilih kaum Muslim di perkotaan khususnya di Kota Yogyakarta menjadi lebih selektif. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang kepedulian masyarakatnya menjadi lebih tinggi di dalam memilih pimpinan di daerah. Masyarakat Kota Yogyakarta menjadi lebih rasional ketika akan menentukan pilihannya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat dalam beragama dapat merubah pola pikir dan perilaku pemilih pada pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

Indikator kesadaran warga masyarakat di perkotaan sebagaimana dikatakan oleh salah satu responden DBY yang menjadi narasumber bahwa:

Masyarakat di wilayah saya yang dulunya termasuk daerah Islam abangan, kejawan meski basiknya Nahdliyin, sekarang ini sudah terlihat melek agama, warga sudah mulai terbiasa datang ke masjid, menghadiri pengajian-pengajian dan atau ceramah, sudah terbiasa memakai atribut keagamaan, sehingga dari kondisi seperti itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang dulunya abangan menjadi agamis. (wawancara, November 2017)

Hasil wawancara di atas menjadi sebuah kewajaran jika di dalam pelaksanaan pilkada di kota Yogyakarta pada tahun 2017 ini terjadi pergeseran peroleh suara yang notabene salah satu paslon yang seharusnya menang di wilayah itu yang terjadi justru malah kekalahan. Warga masyarakat lebih agamis dan lebih rasional di dalam menentukan hak pilihnya.

IV. Simpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan di atas, dapat diambil satu benang merah yang disimpulkan bahwa pada akhirnya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kota Yogyakarta mengalami pergeseran. Pergeseran yang nampak adalah pergeseran pilihan. Pergeseran pilihan terjadi di beberapa kecamatan dimana wilayah yang sebelumnya merupakan basis militan dari partai tertentu yang seharusnya bisa menyumbang suara ke pasangan yang diusung pada kenyataannya justru malah menerima kekalahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang selama ini dibidang kuat dalam basis ideologi politik kepartaiannya bergeser menjadi basis rasional agamis. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat Muslim berikut ini

Pertama, tingkat kepedulian masyarakat Muslim perkotaan terhadap paslon Kepala Daerah pada pilkada 2017 **tinggi**. Masyarakat mulai menggunakan basic kesadaran rasionalitas dan keagamaannya dengan selalu memeriksa/mengenal paslonnya

(47%), mempertimbangkan kualitas dengan tidak pernah mempertimbangkan atribut keagamaan 47%, selalu mempertimbangkan intelegensi 53%, tidak mempertimbangkan gender 70% dan etnis 69%, selalu mempertimbangkan kepribadian 61%, kepakaran 41%, partisipasi 45%. Lebih dari setengahnya (54%) memperingatkan jika mengetahui ada paslon menggunakan cara-cara yang tidak benar dan menolak ketika Paslon pilkada tersandung kasus. Lebih dari setengah (52%) tidak jadi memilih paslon yang tersandung kasus. Melaporkan paslon kepala daerah jika ada yang berbuat curang dan melanggar hukum. lebih dari setengahnya (64%) melaporkan kepada pihak berwenang.

Kedua, Kepedulian masyarakat Muslim di Kota Yogyakarta terhadap Paslon (Paslon) dalam pilkada di kota Yogyakarta tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, *Pertama*, adanya Institusionalisasi Demokrasi. Sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya sebagai jalan pintas untuk melakukan institusionalisasi demokrasi. *Kedua*, adanya kesadaran keagamaan masyarakat. Yogyakarta sebagai wilayah yang dikenal dengan kota pendidikan, kota budaya, kota kreatif, kota agama dan kota multikultur merupakan modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku

- Al Makin, *Keberagaman dan Perbedaan*, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia, Yogyakarta, Suka Press, 2016.
- Abd al-Khaliq, Abd ar-Rahman, *Islam dan Politik*, Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1987.
- Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swarsono, dan Ramlan Surbakti, Jakarta, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, 1992
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Haviland, William A., *Antropologi*, diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo, Jakarta: penerbit Erlangga, 1993.
- Hefner, Robert W (ed), *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007
- Hikam, Muhamad AS, "Islam and the Empowerment of Civil society in Indonesia", dalam *Indonesian Quarterly*, Vol. 24, 1996.
- Kleden, Ignas, *Dialog Antar Agama, Kemungkinan dan Batas-Batasnya* (1985),
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1977.
- Kristiadi, *Terjadi Kemiskinan Ideologi Pancasila*, Kedaulatan Rakyat, tanggal 3 Juni 2013.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Putra, Heddy Shri Ahimsa, "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan", *Masyarakat Indonesia* XII (2), 1986.
- Rahardjo, Dawam, *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan civil Society*, Jakarta: LSAF dan TAF, 1999.
- Rozaki, Abdur, *Mendemokratisasi Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: IRC, 2012.
- Sindunata, "Teologi Pembebasan", dalam *Basis*, No. 03-04, Tahun ke-51, Maret-April 2002.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Soelaiman, Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Soemarwoto, Otto, "Masalah Lingkungan Nasional dan Global: Sebuah Ikhtiar, dalam *Membangun Tanpa Merusak Lingkungan*, Jakarta: Kantor Menteri KLH, 1994.
- Surjomihardjo, Abdurracham. 2008. *Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880–1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- "Yogyakarta Dalam Angka" (PDF). BPS Kota Yogyakarta. Diakses tanggal 2012-12-19.

Jurnal

- Madjid, Nurcholis, "Pluralisme Agama di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 3, Vol. VI, Th. 1995.
- Subhan, Arief, "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan antara Dialog dan Dakwah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. IV Th. 1993.
- Rahmad, Jalaluddin, "Menguak Batas-Batas Dialog Antar Agama" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. IV Th. 1993 .

Surat Kabar

- Rahman, Budhy Munawar-, "Mengembalikan Kerukunan Umat Beragama" dalam *Republika*, 24 Juni 2004.

Website

<http://kbbi.web.id/>